

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS
PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TUBAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh:
RISNA DWI RAHMAWATI
NIM : 2013411048

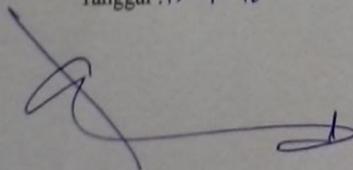
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Risna Dwi Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 09 Februari 1995
NIM : 2013411048
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata
Kabupaten Tuban

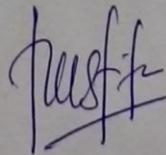
Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma
Tanggal : 15 - 4 - 16



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing
Tanggal : 15 - 4 - 16



Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd.,MSA

I. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola pemerintah semakin besar jumlahnya. Semakin besar dana masyarakat yang dikelola menuntut pertanggungjawaban yang semakin baik. Akuntansi pemerintahan yang semakin baik dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

II. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENGAMATAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja pendapatan pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013-2015.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD (kinerja APBD). Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata sehingga dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan penyusunan APBD.

III. METODE PENGAMATAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yakni berupa Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

c) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai atau tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi, yakni pegawai di bidang penganggaran pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk memperoleh data ataupun keterangan yang diperlukan.

IV. SUBYEK PENGAMATAN

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban berada di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 86 Tuban. Dinas Perekonomian dan Pariwisata ini baru dibentuk pada tahun 2009, sebelumnya pada tahun 2001 sampai dengan 2008 bernama Industri Perdagangan dan Koperasi (INDAGKOP).

V. RINGKASAN PEMBAHASAN

Tugas akhir ini membahas tentang analisis realisasi APBD pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk mengukur kinerja keuangannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013, 2014, dan 2015. Analisis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

4.1 Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan terdiri dari :

A. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik (Mahmudi, 2007 :123).

Tabel 4.1

Perhitungan Selisih Anggaran Pendapatan

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	5.787.695.079,05	5.863.492.629,56	75.797.550,51
2014	6.131.249.427,60	6.215.028.275,32	83.778.847,72
2015	6.587.077.485,06	7.204.372.276,32	617.294.791,26

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan pendapatan tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata sangat baik, karena mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Selain itu, dapat dilihat pula dari tabel 4.1 bahwa setiap tahunnya realisasi anggaran juga terus meningkat.

B. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terdiri dari :

1. Analisis Derajat Desentralisasi

$$\text{Analisis Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:128)

Tabel 4.2

Derajat Desentralisasi

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2013	5.863.492.629,56	5.863.492.629,56	100%
2014	6.215.028.275,32	6.215.028.275,32	100%
2015	7.141.676.614,32	7.204.372.276,32	99%
Rata-rata			100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan derajat desentralisasi di atas, maka dapat dikatakan skala interval kemampuan daerah yang dikeluarkan oleh YPAPI dapat dikatakan baik. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi dari tahun 2013-2015 yakni sebesar 100%, hal ini berarti Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban sudah baik dalam menggali dan mengelola potensi yang ada di daerahnya.

2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:129)

Tabel 4.3

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	5.787.695.079,05	5.863.492.629,56	101%
2014	6.131.249.427,60	6.215.028.275,32	101%
2015	6.551.912.235,06	7.141.676.614,32	109%
Rata-rata			104%

Sumber: Data diolah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007:129). Berdasarkan perhitungan tabel diatas, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dalam kemampuan memperoleh PAD sudah efektif, terbukti dari presentase dari tiga tahun tersebut yang melebihi 100%.

4.2 Analisis Belanja

Analisis Belanja terdiri dari :

A. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (Mahmudi, 2007:143).

Tabel 4.4
Perhitungan Varians (Selisih) Belanja
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	31.908.208.306,35	30.877.302.007,00	-1.030.906.299,35
2014	29.776.234.827,00	27.888.851.642,00	-1.887.383.185,00
2015	31.392.572.002,00	28.811.360.496,00	-2.581.211.506,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel perhitungan analisis varians belanja secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan, menandakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dapat menekan realisasi belanja agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini merupakan perbandingan dari belanja modal dan belanja operasi.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:151)

Tabel 4.5
Rasio Belanja Modal
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	%
2013	11.602.817.995,00	30.877.302.007,00	38%
2014	6.797.275.426,00	27.888.851.642,00	24%
2015	5.926.530.005,00	28.811.360.496,00	21%
Rata-rata			28%

Sumber: Data diolah

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:150)

Tabel 4.6
Rasio Belanja Operasi
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	%
2013	19.274.484.012,00	30.877.302.007,00	62%
2014	21.091.576.216,00	27.888.851.642,00	76%
2015	22.884.830.491,00	28.811.360.496,00	79%
Rata-rata			72%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan dari tabel 4.5 dan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Dinas Perekonomian dan Pariwisata lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal. Hal ini berarti Dinas Perekonomian dan

Pariwisata Kabupaten Tuban lebih memilih untuk mensejahterakan pegawai dan fasilitas yang ada di perusahaan dan kurang mempedulikan keadaan di sekitar perusahaan, misalnya dalam hal belanja tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

C. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:152)

Tabel 4.7

Rasio Efisiensi Belanja

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	31.908.208.306,35	30.877.302.007,00	97%
2014	29.776.234.827,00	27.888.851.642,00	94%
2015	31.392.572.002,00	28.811.360.496,00	92%
Rata-rata			94%

Sumber: Data diolah

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007:152). Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja di atas, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban telah melakukan efisiensi belanja anggaran terbukti dari persentase yang diperoleh selama tahun 2013-2015 tidak melebihi 100%.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja pendapatan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dilihat dari analisis-analisis yang telah dilakukan, secara umum dapat dikatakan sudah baik, hal ini terbukti dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
2. Kinerja belanja Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dilihat dari analisis-analisis yang telah dilakukan secara umum juga dapat dikatakan sudah baik, terbukti dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

VII. SARAN

Saran yang dapat disampaikan yakni sebagai berikut :

Dinas Perekonomian dan Pariwisata dalam analisis keserasian belanja lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal. Akan lebih baik lagi jika antara belanja modal dan belanja operasi tidak memiliki banyak selisih, atau setidaknya bisa seimbang antara belanja modal dan belanja operasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat.
- Artikelsiana.2015.APBN & APBD (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Prinsip), (online).
<http://www.artikelsiana.com/2015/08/apbn-apbd-pengertian-tujuan-fungsi.html#>, diakses 18 Januari 2016).
- Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta Barat: Akademia.
- Bisma, I., Dewa Gde, and Hery Susanto. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007." Jurnal GeneC Swara Edisi Khusus Vol 4 (2010).
- Bupati Tuban. 2008. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2008. Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.
- Chitra Ananda. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011, Skripsi diterbitkan, Universitas Gunadarma, (online).
- Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban. Visi dan Misi, (online). (<http://disperpar.tubankab.go.id/web/web/pages/7/visi-dan-misi>, diakses 16 Januari 2016).
- Deddi Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
- Kusnul Chotimah. 2015. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Tugas Akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- . 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

M. Faqihudin. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. Jurnal Staf Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti Tegal.

Moh. Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Herebitus,A.P. 2011.Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta:BPFE.

------. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta:BPFE.

Yuliana. 2013. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (online).

Zona siswa. 2014. APBN dan APBD (Pengertian, Tujuan, Fungsi), (online). (<http://www.zonasiswa.com/2014/12/apbn-apbd-pengertian-tujuan-fungsi.html>, diakses 13 Januari 2016)